

**RIVALITAS EKONOMI
AMERIKA SERIKAT VS REPUBLIK RAKYAT CHINA
DAN IMPLIKASINYA DI ASIA TENGGARA**

Danis Rahman Putra

NIM 20130510028

Abstract

Nowadays, the rivalry of power between superpower countries are common and had existed in international relations. The form of that such relationship has transformed by the birth of newly developed nations, which it could become a threat to the United States as the greatest superpower these days, that newly developed country is the People's Republic of China. Unwilling to budge, the two countries are making efforts to expand its influence in various regions, such as Southeast Asia. Southeast Asia is a strategic area because it has a lot of potential advantages for them both. Thus, the war of interest between the two countries is seen through a partnership reinforced by US and China, China through Regional Comprehensive Strategic Partnership (RCEP) and the US through the Trans-Pacific Partnership (TPP). Furthermore, there is an implication to Southeast Asia as the target object of this rivalry. Being caught in the midst of the situation, Southeast Asia has a challenge to play its role.

Keyword: rivalitas, persaingan, *superpower*, regionalisme, *Regional Comprehensive Strategic Partnership (RCEP)*, *Trans-Pacific Partnership (TPP)*, implikasi, Asia Tenggara.

Pendahuluan

Perang Dingin menandai adanya suatu bentuk persaingan dua negara adikuasa dalam perebutan kekuasaan di dunia internasional, yakni antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perang yang cenderung tertutup tanpa adanya peperangan fisik secara terbuka ini lebih menekankan dimensi politik demi kepentingan pengaruh kekuasaan mana yang lebih besar, kemudian rivalitas ini berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet yang menandakan kemenangan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa yang berkuasa satu – satunya (Pengertian Perang Dingin, Penyebab dan Dampaknya, 2015). Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara *superpower* yang tidak hanya memiliki kekuatan politik, militer, dan teknologi saja, namun ia juga memiliki kemajuan ekonomi yang sangat besar. Ia tergolong ke dalam negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang mana Produk Domestik Bruto atau *Gross*

Domestic Product (GDP) nominalnya tercatat sebesar US\$ 15,8 triliun pada tahun 2012, yakni seperempat dari GDP nominal dunia (National Economic Trends (Nominal GDP) of US, 2013).

Kondisi AS namun tidak selalu dalam keadaan baik. Pada beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi AS sedang mengalami penurunan, AS dilanda kesulitan yang diakibatkan oleh krisis keuangan yang terjadi antara tahun 2007 – 2008. Pada Februari 2013, tingkat pengangguran mencapai 7,7% atau 12 juta orang, sementara tingkat pengangguran yang juga meliputi kekurangan pekerjaan mencapai 14,3% atau 22,2 juta. Dengan tingginya tingkat pengangguran, berkurangnya pendapatan rumah tangga, dan pemotongan anggaran federal, ekonomi AS masih berusaha untuk pulih kembali. Sedangkan jumlah utang AS sendiri tercatat sebesar US\$ 50,2 triliun pada akhir kuartal pertama tahun 2010, atau sekitar 3,5 kali GDP (Schwartz, 2013).

Di lain sisi, terlahirlah kembali suatu bentuk yang serupa tapi tidak sepenuhnya sama, yang ditandai kehadiran Republik Rakyat China sebagai negara kuat baru yang disinyalir akan menjadi ancaman bagi AS. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978, China berkembang menjadi suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Pada tahun 2010, GDP China mencapai US\$ 5,88 triliun, lalu pada tahun 2013 negara ini menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP setelah AS. Selain itu juga, China menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia yang mencapai rata – rata hampir 10% tiap tahunnya (White, 2013). China tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru, bahkan menurut beberapa pengamat dunia, China dipandang akan menjadi *superpower* baru yang potensial di masa depan (A Point of View: What kind of superpower could China be?, 2012).

AS yang memiliki ambisi besar untuk tetap menjadi *superpower* tentunya tidak tinggal diam, persaingan ini kemudian terjadi meski tidak disuratkan secara terbuka namun dapat tersirat dari kebijakan yang dilaksanakan keduanya. Rivalitas di antara AS dan China ditekankan pada dimensi ekonomi dengan kepentingan ekonomi namun tetap menggandeng kepentingan politik juga, hal ini dilancarkan dengan regionalisme ekonomi. Politik dan militer tidak hanya menjadi satu – satunya aspek nomor satu bagi negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan China, namun aspek ekonomi menjadi aspek lain yang sangat penting baginya agar semakin kuat atau mampu mempertahankan kedudukannya.

Manuver yang masing – masing lancarkan yakni perluasan pengaruh kekuasaan ke berbagai wilayah, di antaranya kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang angkanya mencapai sekitar 560 juta dengan penduduknya cenderung konsumtif. *Gross National Product (GNP)* kawasan ini mencapai US\$ 1,7 triliun, menjadikan Asia Tenggara secara tidak langsung sebagai suatu pasar yang menjanjikan, tidak hanya untuk barang namun juga bagi industri jasa, serta *partner* ekspor maupun impor. (Nawali, 2011). Asia Tenggara juga adalah suatu kawasan yang strategis sebagai tujuan investasi. Salah satu sektor investasi yang besar di Asia Tenggara adalah sumber daya alam, negara – negara di Asia Tenggara pada umumnya memiliki sumber

energi dan kekayaan alam dunia yang besar terutama barang bahan mentah (Naidu-Ghelani, 2015).

Indikator – indikator tersebutlah yang melatar belakangi AS dan China untuk menjadikan negara – negara di Asia Tenggara sebagai sasaran baru yang dapat memperkuat dan memulihkan keadaan perekonomian mereka. Berdasarkan permasalahan ini, tentu timbulah suatu implikasi yang dialami oleh sasaran atau objek dari rivalitas kedua kubu tersebut, yakni dari sisi Asia Tenggara sendiri, secara tidak langsung maka Asia Tenggara turut memiliki posisi yang krusial juga di tengah persaingan AS-China ini.

Kerangka Pemikiran

Regionalisme Ekonomi yakni suatu wadah interaksi berupa *institutional arrangement* yang dirancang untuk memfasilitasi aliran bebas dari barang dan jasa serta untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi di wilayah tertentu. Regionalisme sangat identik dengan kerjasama, perdamaian, integrasi yang pada umumnya terbungkus dalam kerangka geografis. Namun seiring perubahan tatanan dunia, konsep regionalisme sedikit sulit diartikan karena berkonotasi baik dari kedekatan geografis dan rasa kekompakan budaya, ekonomi, politik, dan organisasi (Moon, 2002).

Berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*) dan adanya globalisasi mengakibatkan perubahan bagi dunia internasional, antara lain yakni meluasnya konsep regionalisme. Globalisasi dalam hal ini didefinisikan sebagai terintegrasinya perekonomian dunia dikarenakan semakin menipisnya batas – batas geografis dari kegiatan ekonomi secara regional, dan telah berkembang sejak akhir Perang Dingin. (Cohn, 2011). Konsep ini kemudian diperjelas oleh Ravenhill, regionalisme berakar dari kata *region* yang menurutnya memiliki anggota dan definisi batas yang jelas, batasan tersebut tidak harus berupa cakupan geografis, namun dapat berupa konstruksi sosial yang ditentukan anggotanya (Ravenhill, 2011).

Berdasarkan pada masanya, regionalisme terbagi menjadi dua periode, yakni Regionalisme Klasik (Lama) dan Regionalisme Baru. Regionalisme Klasik yaitu regionalisme yang lahir pada tahun 1960an, terjadi seiring dimulainya era Perang Dingin yang ditandai dengan rivalitas antara Blok Timur (Uni Soviet) dan Blok Barat (Amerika Serikat). Regionalisme Klasik ini bersifat *high politics*, atau di dalamnya aspek politik lebih mendominasi, dan fokus regionalisme pada masa ini adalah aspek pertahanan dan keamanan. Kerjasama pada masa ini juga cenderung regional atau terbatas dalam satu kawasan saja.

Lahirnya Regionalisme Baru pada pasca Perang Dingin sebagai perbandingan dari Regionalisme Klasik, yakni pada tahun 1990an, bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet, yang mengakibatkan berakhirnya kekuatan bipolar menjadi unipolar yang dikuasai Amerika Serikat. Regionalisme Baru cenderung lebih menekankan pada aspek *low politics*, yakni dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan hal lainnya. Perbedaan jelas dari Regionalisme Klasik dan Regionalisme Baru yakni pada Regionalisme Baru, kerjasama regional dilaksanakan tidak berdasarkan kesamaan geografis, negara – negara yang bergabung bisa dari berbagai kawasan, dimana hal

itu sangat bertolak belakang dengan Regionalisme Klasik yang di dalamnya pihak yang terlibat berasal dari kesamaan geografis (Cohn, 2011).

Regionalisme dapat diartikan pula sebagai pembentukan integrasi – integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah suatu proses dalam meniadakan atau mengurangi hambatan – hambatan terhadap perdagangan, investasi dan mobilitas faktor produksi internasional. Integrasi ekonomi memiliki tingkatan yang sederhana yaitu *Preferential Trade Agreement (PTA)*. PTA adalah suatu persetujuan antar dua negara atau lebih yang memberlakukan tarif yang lebih rendah untuk produk yang diperdagangkan di antara mereka dibandingkan dengan produk yang diperdagangkan dengan negara di luarnya (Preferential Trade Agreements in Asia and the Pacific, 2002) Ditinjau lebih jauh, PTA dapat disebut sebagai *Regional Trade Agreement (RTA)* yang merupakan kesepakatan yang dibentuk dalam satu kawasan, antar kawasan, antar negara – negara berkembang maupun maju, dan bentuk kesepakatan lainnya. Istilah RTA lebih dikenal secara umum karena sering dipergunakan dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* yang mengacu pada penggunaan kerjasama atau perjanjian *cross-regional* maupun regional.

Dilihat dari segi keterkaitan regionalisme dan *power*, pandangan realis mendukung hal ini. Berdasarkan perspektif ini, organisasi regional dilihat sebagai upaya untuk membentuk aliansi bersama untuk merespon tantangan eksternal, seperti ancaman yang mempengaruhi kekuasaan. Hegemoni menjadi penting dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional (Fawcett, 2002). Maka, bergabungnya negara *superpower* dalam kerjasama ekonomi kawasan atau regionalisme disinyalir karena ada pertimbangan selain ekonomi, yakni *power*. Perlu ditekankan juga bahwa pemaksaan *power* dan hegemoni pada masa kini sudah jauh berbeda bila dibandingkan dengan yang terjadi pada masa Perang Dunia maupun Perang Dingin. Perluasan pengaruh maupun kekuasaan sudah lebih halus dan melalui aspek – aspek vital seperti ekonomi, bukan hanya politik dan keamanan.

Penjelasan yang sebelumnya telah dipaparkan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat China di kawasan Asia Tenggara, keduanya melaksanakan kebijakan dengan membentuk suatu Regionalisme Ekonomi yang masing – masing kubu hadirkan di kawasan tersebut. Regionalisme yang dimaksud merupakan Regionalisme Baru, yang masing – masingnya termasuk dari bentuk *Preferential Trade Agreement* atau *Regional Trade Agreement* yang dilaksanakan di kawasan yang tidak hanya dilaksanakan demi kepentingan ekonomi, namun demi kepentingan lainnya.

Kawasan Asia Tenggara rata – rata terdiri dari negara berkembang. Bagi negara berkembang, regionalisme dapat meningkatkan *bargaining position* mereka untuk melakukan kerjasama dengan negara di luar *region*. Sebagai contoh, kawasan ini awalnya hanya terintegrasi dalam *Association of Southeast Asia Nation (ASEAN)* saja, selanjutnya melalui ASEAN maka ia dapat berintegrasi dengan ekonomi yang lebih global seperti diadakannya kerjasama perdagangan bebas dari negara – negara kawasan lain. Jelasnya, tanpa adanya regionalisme seperti ASEAN, negara – negara

berkembang tersebut akan sangat sedikit kemungkinan dapat terintegrasi dengan pasar global secara individual.

Dikarenakan kawasan ini notabene terdiri dari negara – negara berkembang yang membutuhkan banyak kerjasama dan bantuan tidak hanya di ranah regional namun juga global, maka Regionalisme Ekonomi yang ditawarkan oleh AS dan China disini dapat menjadi daya tarik besar bagi kawasan Asia Tenggara untuk bergabung dengan mereka. Di lain sisi, selain memberikan implikasi yang baik, bergabungnya negara – negara Asia Tenggara ke dalam kerjasama yang ditawarkan AS dan China tersebut dapat memberikan suatu implikasi tertentu yang kurang menguntungkan pula, baik itu pada aspek ekonomi maupun politik.

Power atau kekuasaan memiliki peran yang berbagi dengan konsep ‘negara’ sejak lahirnya disiplin ilmu hubungan internasional. Tujuan suatu negara dan *power* tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dengan kata lain, salah satu tujuan dari setiap negara yaitu *power*. Arnold Schwarzenberger melihat bahwa *power* merupakan salah satu faktor utama dalam hubungan internasional. Menurutnya, *power* bukanlah sesuatu yang bersifat destruktif, liar, dan statis. *Power* adalah suatu perpaduan antara pengaruh persuasif dan kekuatan koersif (Yani, 2006).

Dalam hubungan internasional, setiap negara memiliki kekuatan, namun kekuatannya tersebut berbeda – beda di setiap negara. Sebenarnya, adanya kekuatan di setiap negara disebabkan oleh berbedanya potensi atau unsur kekuatan yang dimiliki oleh masing – masing. Para ahli menekankan bahwa dasar pembentukan kekuatan negara yang paling utama dan terpenting adalah penduduk, sumber daya alam, dan industry (Hayati, 2007). Maka tidak heran, negara – negara *superpower* yang notabene memiliki keunggulan dalam aspek – aspek tersebut menjadi pihak yang paling mampu dalam posisinya untuk menjalankan *power*-nya.

Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) mendefinisikan *power* sesuai dengan identitas dan kepentingannya yang memadukan antara *soft* dan *hard power* menjadi karakteristik yang diterapkan. Keduanya mampu menunjukkan diri sebagai negara *superpower* yang memiliki daya tarik yang cukup besar serta kebijakan – kebijakan yang mengedepankan kerjasama dan pembangunan kawasan. Dengan memanfaatkan kekuatan negara, mereka melakukan pendekatan di kawasan Asia Tenggara dengan tawaran untuk bekerjasama yang akan memberikan iming – iming keuntungan menggiurkan bagi para negara – negara di Asia Tenggara. Kebijakan itu dilakukan AS dan China tidak lain sebagai salah satu alat untuk merealisasikan kepentingan nasional, demi mendapatkan keuntungan ekonomi, serta mampu memperkuat pengaruh dan *power*nya di kawasan sebagai sarana bertanding atau rivalitas kekuatan antara kedua kubu. Keduanya, sebagai negara *superpower* saling memperbesar dan memperluas *power* mereka ke kawasan agar mampu menjadi negara yang paling kuat di antara yang kuat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang menjelaskan suatu persoalan dengan mencari fakta – fakta yang terjadi untuk dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang akurat terhadap isu yang diteliti. Jenis data yang akan dipakai pada penelitian ini mendasar pada data sekunder, yang berarti data diperoleh dari hasil atau bahan – bahan dokumen tentang obyek penelitian seperti buku, jurnal ilmiah, dan berita dari surat kabar maupun internet. Penelitian ini akan menggunakan teknik pustaka (*library research*), sesuai dengan penggunaan data sekunder maka pencarian data akan difokuskan data – data pustaka yang akan diseleksi kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil yang baik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan akan digambarkan berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan untuk selanjutnya disesuaikan antar fakta yang satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang baik.

Hasil Penelitian

1. *Trans-Pacific Partnership (TPP)* sebagai Strategi AS di Asia Tenggara

TPP yakni perjanjian perdagangan bebas regional di kawasan Asia-Pasifik termasuk di dalamnya Asia Tenggara yang diberlakukan pada tahun 2009 dengan beranggotakan 12 negara dari kawasan Asia, Pasifik, dan Amerika Latin. Keikutsertaan Amerika Serikat dalam TPP direalisasikan secara resmi pada tahun 2008. Bergabungnya AS ini dikarenakan ia tengah berada dalam keadaan krisis ekonomi pada tahun 2008, merasa perlu untuk bergabung dengan kerjasama ekonomi demi memulihkan kembali perekonomian negara, AS kemudian bergabung ke dalam TPP (Yuan, 2012).

Upaya yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap kawasan ini adalah sebagai bentuk prioritas politik luar negerinya yang sejalan dengan kebijakan masa pemerintahan Presiden Obama, yakni “*Pivot to Asia*”. Strategi yang dikenal juga dengan *rebalancing* yang dikeluarkan oleh Obama ini adalah usaha AS untuk mengembangkan kerjasamanya di Asia-Pasifik khususnya Asia Tenggara (Remarks by President Obama to the Australian Parliament, 2011).

TPP merupakan suatu kerjasama yang memiliki standar tinggi karena adanya penghapusan biaya pajak 0% untuk perdagangan barang, jasa, dan yang berbeda dengan perjanjian lain yakni mencakup sektor pertanian, serta membangun peraturan yang membahas berbagai masalah, baik itu hak kekayaan intelektual (haki), investasi asing (FDI), dan isu – isu terkait perdagangan lainnya. Berdasarkan tujuannya, TPP secara garis besar bertujuan mempererat hubungan dan kerjasama di antara anggota dengan menciptakan sebuah kawasan perdagangan bebas guna memperlancar jalur perdagangan di kawasan yang terintegrasi dengan baik. TPP telah melaksanakan negosiasi sebanyak sembilan kali putaran dan telah melaksanakan pertemuan sejak Maret 2010, namun belum sepenuhnya terealisasi (TPP Negotiation Updates, n.d.).

Ditinjau dari segi manfaat, secara ekonomi TPP akan menyatukan negara – negara di dalamnya yang selanjutnya merepresentasikan sebesar satu pertiga dari perdagangan dunia dan sebesar 40% dari total GDP dunia. Manfaat TPP lainnya yakni kerjasama ini dapat menghasilkan perjanjian yang dapat menjadi acuan bagi perjanjian perdagangan bebas yang lebih luas melebihi dari 12 negara yang sudah bergabung hingga saat ini. Namun, TPP mengandung isu – isu kontroversial yang menjadi perdebatan, yakni menyangkut hak kekayaan intelektual dan sektor pertanian yang dimasukkan ke dalam kerangka peraturan perjanjian untuk dapat dipengaruhi, dimana isu ini sangat sensitif yang tidak pernah diterapkan dalam perjanjian manapun sehingga perlu dipikirkan dengan hati – hati oleh para calon anggota yang masuk khususnya negara – negara berkembang seperti di kawasan Asia Tenggara. Hal inilah yang membuat perjanjian ini masih belum terlaksana (Putra, 2011). Ketentuan – ketentuan ini berlaku timbal balik terhadap sesama anggota saja dan tidak berlaku terhadap negara non-anggotanya. Para negara – negara anggota juga harus mengikuti jadwal liberalisasi dengan ketentuan yang tidak bisa diubah (*irreversible*) dan bersifat mengikat (*legally binding*) (Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional, 2013).

Jika TPP dapat sepenuhnya terlaksana, maka hal ini akan menarik minat dari negara lain yang tidak bergabung yang merugi ke dalam perjanjian. Negara yang merugi tersebut akan tertekan, jika tekanan tersebut meluas melebihi satu negara maka akan memperluas juga jangkauan dari TPP, yang pada akhirnya negara – negara tertekan ini akan ikut bergabung ke dalam TPP. Keanggotaan TPP saat ini tidak melibatkan negara besar dalam hal ekonomi seperti Republik Rakyat China yang merupakan rival bagi AS di kawasan Asia Tenggara ini. Kurangnya pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara mendorong AS agar bergabung dengan TPP sebagai upaya pendekatan hubungan dengan Asia Tenggara. Selanjutnya, setelah AS melakukan kerjasama ekonomi seluruh negara Asia Tenggara, maka akan membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk mendominasi seluruh wilayah Asia lainnya. Dampak dari perjanjian TPP kepada China sebagai rival bagi AS sangat tergantung pada apakah kerjasama TPP dapat berhasil dinegosiasikan dan diimplementasikan di masa mendatang. TPP akan memiliki beberapa dampak positif bagi perekonomian AS, jika mampu berhasil untuk dilaksanakan.

2. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* sebagai Strategi RRC di Asia Tenggara

RCEP merupakan perjanjian kerjasama regional atau RTA yang dicetuskan oleh ASEAN. Tujuan utama dari RCEP yakni menciptakan suatu sinergi baru dari sepuluh negara anggota ASEAN yang digabung dengan kerjasama mitra ASEAN yang sudah melakukan hubungan ekonomi dengan ASEAN. RCEP diekspektasikan mampu memperluas anggota partisipasi serta meminimalkan biaya transaksi untuk bisnis dan segala bentuk inefisiensi yang diciptakan oleh perjanjian perdagangan

ASEAN sebelumnya. RCEP kini beranggotakan 16 negara, di antaranya sepuluh anggota ASEAN bersama Australia, Selandia Baru, India, RRC, Korea Selatan, dan Jepang (China Plans to Counter-Balance The Influence of TPP?, n.d.).

RCEP memiliki agenda – agenda yang berupa negosiasi perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, penyelesaian sengketa, dan lain – lain. Adapun manfaat RCEP, yakni dapat membantu meregionalisasi rantai penyedia fasilitas untuk perdagangan global sehingga membuat Asia sebagai pabrik dunia, mempromosikan arus investasi yang lebih mudah serta transfer teknologi, mengurangi tumpang tindih antara FTA di Asia-Pasifik, membantu mengurangi sentimen proteksionis dalam ekonomi global, serta mengurangi hambatan perdagangan dan akan membuat impor pangan dan barang konsumsi yang lebih murah juga bermanfaat bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah (Wignaraja, 2014).

Dari sudut pandang China, RCEP adalah RTA yang menguntungkan karena menawarkan akses terhadap pasar Jepang, India dan Australia yang mana hal tersebut sangat bermanfaat mengingat upaya pembangunan kerjasama dengan tiga negara tersebut belum berhasil. Selain itu, bergabung dengan RCEP sangat baik bagi China karena mengecualikan AS yang tidak ada di dalamnya, maka China dapat menghindari ancaman AS lewat perjanjian TPP di kawasan Asia Tenggara (Yifei, 2015). Jika RCEP berhasil disepakati, maka kawasan perdagangan bebas yang besar akan tercipta tanpa Amerika Serikat sebagai bagian darinya.

Melihat terjadinya pertumbuhan berkelanjutan yang semakin pesat di masa depan, keseluruhan GDP RCEP secara potensial akan tumbuh lebih dari US\$ 100 triliun pada tahun 2050, atau sekitar dua kali lipat ukuran proyek ekonomi agregat TPP (Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Issues and Way Forward, 2013). Perjanjian ini sendiri dijadwalkan akan terealisasi pada akhir tahun 2017, dan bila terealisasi akan sangat memberi keuntungan amat besar terutama China sebagai negara *superpower* yang berpengaruh paling besar di dalamnya mengingat AS tidak tergabung dalam perjanjian ini (Chandran, 2017).

3. Analisis Rivalitas antara AS – RRC melalui TPP dan RCEP sebagai Regionalisme Ekonomi

Bergabungnya Amerika Serikat maupun Republik Rakyat China di dalam kerjasama perdagangan regional di Asia Tenggara, yakni *Trans-Pacific Partnership (TPP)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, dilihat penulis sebagai sesuatu yang kentara dalam upaya mereka melaksanakan pertimbangan kekuatan di kawasan selain demi kepentingan ekonomi. Ekonomi memang tidak dapat terlepas dengan unsur politik dalam kepentingan suatu negara bila berhubungan internasional, hal ini dapat dilambangkan seperti uang koin yang memiliki dua sisi berbeda namun terikat dalam satu, begitu juga sama halnya dengan hubungan internasional dewasa ini. Perlu ditekankan juga bahwa pemaksaan *power* dan hegemoni pada masa kini sudah jauh berbeda bila

dibandingkan dengan yang terjadi pada masa lampau. Perluasan pengaruh maupun kekuasaan sudah lebih halus dan melalui aspek – aspek vital, seperti ekonomi, bukan hanya politik dan keamanan.

China telah jelas semakin melebarkan sayapnya ke negara – negara tetangga khususnya Asia Tenggara seiring menguatnya kondisi China yang merangkak menuju negara *superpower* di Asia. Menyadari akan realitas itu, AS kemudian bergabung dengan TPP tidak hanya demi alasan *rebalancing* untuk menguatkan pengaruhnya di Asia Tenggara, namun juga demi membendung pengaruh China di kawasan. Merespon bergabungnya AS ke TPP, kemudian China bergabung dengan RCEP sebagai tandingannya. Penulis menilai bahwa persepsi mengenai merosotnya pamor dan pengaruh AS sebagai negara adidaya di tataran global karena permasalahan ekonomi dalam negeri telah sedikit banyak ikut mendorong Negeri Tirai Bambu ini unjuk gigi di kawasan. Stabilitas hubungan dengan negara – negara tetangga sebagai politik luar negerinya menjadikan Asia Tenggara sebagai prioritas yang harus tetap dikokohkan karena gejolak yang terjadi di kawasan akan berimplikasi langsung terhadap kondisi dalam negeri China (Yuliantoro, 2012).

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang digunakan penulis, TPP maupun RCEP adalah suatu bentuk dari konsep regionalisme ekonomi yang merupakan jenis “regionalisme baru” dimana mengedepankan aspek ekonomi dan dilaksanakan bersama lebih dari satu kawasan yang sama, dimana masing – masing kebijakan termasuk bentuk dari *Preferential Trade Agreement (PTA)* atau lebih dikenal *Regional Trade Agreement (RTA)* yang memberlakukan peraturan khusus untuk negara – negara anggota saja dan tidak memberlakukannya dengan negara – negara di luar anggotanya.

Meninjau keterkaitan kepentingan AS maupun RCEP dalam regionalisme ekonomi, keduanya melaksanakan kerjasama dengan alasan sebagai upaya persaingan kekuasaan serta untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Hal itu sejalan dengan perspektif dalam konsep regionalisme ekonomi bahwa organisasi regional dilihat dari kacamata politis sebagai upaya untuk membentuk aliansi bersama untuk merespon tantangan eksternal, seperti ancaman yang mempengaruhi kekuasaan. Hegemoni menjadi penting dalam upaya mewujudkan kepentingan nasional (Fawcett, 2002). Maka, bergabungnya negara *superpower* dalam kerjasama ekonomi kawasan atau regionalisme disinyalir karena ada pertimbangan selain ekonomi, yakni *power*.

Kedua bentuk regionalisme ekonomi baik TPP maupun RCEP ini adalah sebagai instrumen politik luar negeri masing – masing negara. AS dengan kebijakan ‘Pivot to Asia’ yang ingin menyeimbangkan lagi hubungannya dengan Asia karena pengalaman masa lalunya yang cenderung terkesan melupakan Asia karena lebih fokus ke kawasan Timur Tengah atas asas ‘War on Terror’. Sedangkan bagi China, kerjasama ini sejalan dengan politik luar negerinya yang berasaskan ‘Asia First’ atau “berhubungan baik dengan tetangga” yang mengacu pada strategi ini, China merasa diharuskan agar memfokuskan politik luar negerinya pada negara tetangga dan wilayah pengaruh terdekatnya.

Penulis pahami pembentukan forum kerjasama TPP maupun RCEP yakni sebagai usaha selaku negara dominan untuk menciptakan suatu wadah dimana ia dapat memainkan dan menerapkan pengaruhnya. Istilah yang disebut dengan “kompetisi damai” lebih cocok dalam menjelaskan hubungan keduanya. Penting juga untuk dipahami bukan hanya mengenai siapa sajakah yang tergabung di dalamnya dan bagaimana kerjasama ini dilaksanakan namun siapakah juga yang tidak tergabung di dalamnya. Strategi China dalam penguatan kerjasama perdagangan ekonomi regional dan investasi melalui RCEP ini tidak mengikutsertakan Amerika Serikat, begitu juga sebaliknya TPP tidak mengikutsertakan China di dalamnya.

Singkatnya, bagi negara yang relatif kuat seperti keduanya, bentuk regionalisme ekonomi seperti TPP maupun RCEP merupakan kesempatan untuk menjalankan strategi, meraup keuntungan negara, tempat untuk mewartakan hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi *power* mereka. China melakukan regionalisme demi memperbesar pengaruh mereka, memperluas aliansi, serta keuntungan ekonomi. Begitu juga sama halnya AS hadir di kawasan ini, namun hadirnya AS juga untuk bersaing dengan China demi upaya *balancing* di kawasan. Hingga saat ini kedua perjanjian kerjasama tersebut baik TPP maupun RCEP masih dalam proses negosiasi dan belum sepenuhnya terealisasi. Keberhasilan masing – masing kepentingan AS maupun China akan bisa dicapai tergantung sejauh mana kedua perjanjian diimplementasikan.

4. Implikasi Rivalitas Ekonomi AS – RRC di Asia Tenggara

Posisi negara – negara di Asia Tenggara antara rivalitas Amerika Serikat dan Republik Rakyat China menjadi penting namun menjadi dilema dengan adanya kerjasama ekonomi yang keduanya lancarkan di Asia Tenggara. Saat ini negara – negara Asia Tenggara dalam ASEAN memasuki dua perundingan multilateral dalam lingkup Asia-Pasifik baik itu *Trans-Pacific Partnership (TPP)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. Kini empat anggota ASEAN bergabung dalam TPP, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Sedangkan seluruh negara – negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN masuk ke dalam RCEP, namun tidak dipastikan juga bahwa ASEAN lebih mendukung RCEP dan membuatnya mampu mengalahkan TPP, semua itu tergantung bagaimana kedua perjanjian ini terlaksana. Dari hal ini pula, penulis memandang bahwa terbaginya negara – negara ASEAN di antara TPP maupun RCEP akan berdampak pada “Sentralitas ASEAN” atau kesatuan antar anggota ASEAN yang bisa saja menjadi terpolarisasi dan tidak dapat berfungsi baik karena terbaginya ASEAN ke dalam dua kerjasama dari kedua kubu yang berbeda.

Beranjak dari hal itu, penulis terlebih dahulu akan melakukan perbandingan keduanya dari segi manfaat yang akan berpengaruh pada ASEAN. TPP merupakan perjanjian dagang regional yang menerapkan standar tertinggi dalam hubungan perdagangan bebas di antara anggotanya yakni penetapan yang tidak hanya mengatur tentang aspek ekonomi, namun juga turut mengatur masalah sosial maupun lingkungan. Bila ada anggota yang menyalahi kesepakatan tersebut, maka mereka dapat dikenai sanksi ekonomi (Wisnu, 2016). Selain itu, TPP juga turut melibatkan isu pertanian yang cenderung sensitif untuk diliberalisasikan. Hal – hal

yang telah disebutkan yakni isu pertanian dan hak kekayaan intelektual (haki) menghadapi suatu rintangan sehingga mengakibatkan TPP memiliki persoalan. Meski demikian, sejumlah pengamat menyebut TPP lebih berkualitas karena meliberalisasi hal yang berbeda dan belum pernah direalisasikan, memang sektor – sektor tersebut dianggap isu sensitif, tetapi jika kesepakatan terlaksana maka akan menjadi langgeng dan menguntungkan.

Sementara itu, standar tinggi yang telah disebutkan dalam TPP tidak ada di dalam RCEP. RCEP lebih mengedepankan kondisi dari masing – masing negara sebelum mampu untuk meliberalisasikan perdagangan antar negara anggotanya. RCEP lebih memikirkan kesepakatan tunggal mengenai perdagangan produk, baru setelahnya melakukan penurunan bea atau pajak masuk. Kesepakatan ini juga jauh dari keterkaitan hambatan non-tarif. RCEP juga memiliki cakupan geografis lebih terbatas dibandingkan dengan TPP yang sangat luas, RCEP juga tidak memasuki sektor – sektor sensitif seperti pertanian dan hak kekayaan intelektual (haki). Oleh karena itu, RCEP dipandang lebih realistis sehingga lebih besar kemungkinannya untuk berjalan bagi ASEAN. Tetapi, rendahnya tingkat kesepakatan tersebut mengakibatkan rendahnya pula keuntungan yang nanti didapatkan anggotanya.

Dalam menanggapi kedua perjanjian, ASEAN tentu akan mengalami kesulitan dalam memainkan peran dan pengaruhnya sebagai sebuah komunitas ekonomi yang ada di dalam TPP. Karena itu pula, ASEAN diprediksikan akan lebih berkehendak pada terealisasinya RCEP dimana ASEAN bisa hadir secara utuh sebagai sebuah ekonomi yang terintegrasi karena menggunakan kerangka ASEAN sebagai dasar pembentukannya, maka dengan begitu ASEAN bisa berharap RCEP mampu meningkatkan integrasi dan kerjasama ekonomi antar anggotanya. Namun masalahnya, merealisasikan manfaat RCEP bagi ASEAN juga tidaklah mudah. Pasalnya, perselisihan beberapa negara ASEAN dengan China selaku negara yang memainkan peranan kuat di RCEP justru sempat mengalami pertikaian dalam perebutan klaim wilayah Laut Cina Selatan yang belum terselesaikan hingga kini (Chen, 2015).

Berkaitan dengan dampak pada sektor ekonomi dalam ASEAN yaitu *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jika suatu saat TPP maupun RCEP disepakati, akan terjadi suatu implikasi yang kurang menguntungkan bagi ASEAN, yakni banjirnya produk impor ke negara – negara ASEAN yang tentunya akan semakin besar karena beberapa negara anggota dapat menjadi pintu masuk terhadap berbagai produk yang berasal dari negara – negara mitra dua kesepakatan perdagangan itu khususnya AS dan China. Masalah ini muncul juga karena MEA menyepakati peningkatan akses pasar di dalam anggota ASEAN. Dampak negatif tersebut jelas akan berimbas terhadap industri produk konsumsi dan sejenisnya di dalam negeri. Dampak yang diberikan oleh TPP dan RCEP terhadap ASEAN akan sangat bergantung pada ASEAN sebagai sebuah kesatuan, semuanya bersandar pada kualitas negosiasi negara – negara sesama anggota.

Setelah keanggotaan ASEAN baik di TPP maupun RCEP, Asia Tenggara akan berperan sebagai kawasan konsumen bagi produk AS – China maupun negara

lainnya yang dibandrol dengan harga yang lebih murah ketimbang produk lokal. Dikhawatirkan, hal itu akan menimbulkan kerugian besar di dalam negeri karena produknya kalah bersaing yang kemudian menimbulkan turunnya penghasilan rakyat dan bahkan mengakibatkan pengangguran besar – besaran, sehingga keadaan ekonomi negara semakin terpuruk. Jika produk – produk dalam negeri tidak kompetitif, negara itu hanya akan jadi pasar bagi produk – produk negara lain. Negara – negara berkembang di Asia Tenggara dalam ASEAN bisa saja tidak memilih TPP karena alasan melindungi sektor haki, pertanian dan kepentingan domestik lain. Namun, apabila TPP terwujud di masa mendatang, negara tersebut hanya akan menjadi penonton yang menyedihkan dari bentuk baru perdagangan di Asia-Pasifik. Strategi yang bisa dilakukan adalah membuat akses ke TPP sambil melihat untung ruginya. Perlu juga dikaji bagaimana yang dirasakan empat negara ASEAN peserta TPP selama bergabung (Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional, 2013).

Beberapa negara ASEAN yang sudah berpartisipasi di kedua negosiasi atau memiliki keanggotaan ganda, yakni Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Memang, dalam menanggapi kedua perjanjian, ide keanggotaan ganda adalah hal yang menarik karena dapat merasakan manfaat dari masing – masing skema. Namun, TPP dan RCEP menawarkan dominasi saling berlawanan, yang satu berfokus pada integrasi mendalam dengan Amerika, dan yang satunya dengan China. Negara yang terlibat dalam negosiasi ganda diharuskan menyelaraskan ketentuan mereka dalam rangka penyesuaian kebijakan internal mereka agar menyatu dengan persyaratan dari kedua skema. Tetap saja, tumpang tindih yang ditimbulkan akan membuatnya lebih rumit, apalagi kedua skema memiliki aturan yang berbeda – beda, negara yang beranggotakan ganda ini perlu lebih ekstra bertindak dan memutar ide dalam mengatur kebijakan agar meminimalisir kerugian yang kemungkinan timbul.

Karena dua proposal perjanjian ini saling berkompetisi, maka kecil kemungkinan kedua perjanjian tersebut secara simultan memberikan keuntungan. Maka, ASEAN perlu mempertimbangkan dengan baik kesepakatan mana yang akan dipilih. RCEP akan menempatkan ASEAN sebagai pusat kesepakatan dagang karena turut dicetuskan oleh ASEAN dalam kerangkanya, sedangkan TPP cenderung meninggalkan atau tidak melibatkan kerangka ASEAN sebagai asas perjanjian. Persoalan geopolitik juga akan menempatkan ASEAN pada posisi rumit dengan melihat analisis yang menyebutkan TPP lebih dipengaruhi AS, sementara RCEP dalam pengaruh China. Di satu sisi, persaingan antara RCEP dan TPP akan membuat ASEAN lebih memiliki peran penting sebagai lembaga regional. RCEP mengakui “Sentralitas ASEAN”, meskipun ini lebih nyaman ditafsirkan oleh China untuk mengecualikan Amerika Serikat di dalamnya karena tidak memiliki satupun FTA dengan ASEAN. Di sisi lain, sentralitas ASEAN tidak akan benar – benar terjamin dalam RCEP, di mana ia mungkin bisa dikesampingkan oleh kekuatan ekonomi yang lebih besar seperti China.

Solidaritas ASEAN akan terpengaruh. Dua proposal yang bersaing bisa membagi ASEAN, bukan tidak mungkin bahwa ASEAN akan dibagi menjadi pro-TPP dan pro-RCEP. Negara – negara ASEAN dapat terpecah ke dalam kubu yang memihak AS atau China. Apabila hal ini terjadi, ASEAN akan kembali terpolarisasi, yang akan berakibat pada marjinalisasi peran ASEAN sebagai salah satu pilar arsitektur keamanan di Asia. Menghadapi skenario demikian, Asia Tenggara akan dihadapkan pada tantangan sulit. Jelas Asia Tenggara tak akan dan tak boleh tunduk kedua kubu, Asia Tenggara harus dipertahankan sebagai kawasan damai dan otonom, dimana masalah – masalah di kawasan ini harus diselesaikan oleh negara – negara di kawasan sendiri. Dalam konteks itu, *ASEAN Centrality* menjadi terasa sangat penting untuk direnungi oleh negara – negara Asia Tenggara dalam ASEAN. Rivalitas ekonomi dan politik antara China dan Amerika Serikat, jangan sampai membuat ASEAN terjebak di tengah arus pusaran persaingan kedua negara tersebut.

Kesimpulan

Rivalitas ekonomi yang terjadi di antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) membuktikan bahwa perang kekuasaan telah terlahir kembali menjadi suatu bentuk yang baru. Berbeda dengan era Perang Dingin, persaingan negara – negara besar saat ini lebih menekankan aspek ekonomi, namun tetap menggandeng aspek politik di baliknya. AS maupun China menggabungkan diri terhadap suatu Regionalisme Ekonomi yang diperkuat masing – masing kubu yakni *Trans-Pacific Partnership (TPP)* yang dipimpin oleh AS, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang dipimpin oleh China. Berada dalam wadah Regionalisme Ekonomi dengan bentuk *Regional Trade Agreement (RTA)* ini, keduanya memiliki tujuan utama demi mencapai kepentingan ekonomi masing – masing, namun dilaksanakan juga demi kepentingan politik yakni sebagai perimbangan kekuasaan di kawasan.

Asia Tenggara dengan kondisi dan potensinya yang memukau, telah menarik minat AS maupun China untuk melancarkan pula kepentingan politiknya, AS yang ambisius untuk tetap menjadi negara *superpower* satu – satunya di dunia tidak ingin ada negara lain yang merebut posisinya di kawasan. Sedangkan China yang kini tengah menjadi *the new rising superpower* yang mengedepankan kawasan tetangga untuk menjadi sasaran utamanya untuk memperluas pengaruhnya. Baik Amerika Serikat maupun China memang membantah saling berseteru, namun dapat diketahui bahwa memang kedua negara bersaing melalui TPP dan RCEP. Istilah yang disebut dengan “kompetisi tertutup” lebih cocok dalam menjelaskan hubungan keduanya.

Kedua perjanjian kerjasama tersebut baik TPP maupun RCEP masih dalam proses negosiasi dan belum bisa terealisasi karena adanya ketimpangan dari peraturan yang ditetapkan sehingga membuat negara – negara di Asia Tenggara masih berpikir ulang dalam meninjaunya. TPP dengan standar tertingginya dan RCEP yang masih dipertanyakan manfaatnya. Keberhasilan masing – masing kepentingan AS maupun China akan bisa dicapai tergantung sejauh mana kedua perjanjian tersebut diimplementasikan.

Ditempatkan sebagai objek yang diperebutkan, membuat Asia Tenggara khususnya dalam kerangka kerjasama *Association of Southeast Asia Nation (ASEAN)* memiliki peran krusial namun juga dirasakan menjadi suatu dilema yang kompleks. Hal ini memberikan suatu implikasi yang menjadi tantangan bagi Asia Tenggara. Oleh karena itu, kawasan ini perlu memanipulasi perannya yang menjadi objek perebutan untuk berubah menjadi motor pengendali sehingga nantinya akan menjadi pihak yang paling diuntungkan. ASEAN tidak bisa membiarkan dirinya terseret arus rivalitas di antara AS dan China.

Gencarnya para *superpowers* dalam memainkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, dapat memicu terpecah belahnya konsentrasi dan sentralitas ASEAN. ASEAN harus menguatkan peran aktifnya dengan menjaga kepentingan AS dan China di kawasan dengan mempertimbangkan hubungan kerjasama ekonomi yang menguntungkan ini. Bila hal ini gagal, maka kawasan Asia Tenggara hanya akan menjadi arena persaingan kedua kubu dalam mengejar kepentingannya semata dan menjadi pihak yang dirugikan.

Referensi

- A Point of View: What kind of superpower could China be?* (2012, October 19). Retrieved from BBC: <http://www.bbc.com/news/magazine-19995218>
- Chandran, N. (2017, January 12). *China-backed trade deal may not gain from TPP's loss. Blame India*. Retrieved from CNBC: <http://www.cnbc.com/2017/01/12/trumps-win-puts-tpp-in-danger-but-china-backed-trade-deal-may-not-gain-because-of-india.html>
- Chen, J. (2015, September 9). *TPP and RCEP: Boon or Bane for ASEAN?* Retrieved from Asia Foundation: <http://asiafoundation.org/2015/09/09/tpp-and-rcep-boon-or-bane-for-asean/>
- China Plans to Counter-Balance The Influence of TPP?* (n.d.). Retrieved from International Financial Times China: <http://www.ibtimes.com.cn/articles/8777/20120117/china-tpp.htm>
- Cohn, T. (2011). Regionalism and the Global Trade Regime. In *Global Political Economy 6th edition* (pp. 212 - 214). Routledge.
- Fawcett, L. a. (2002). *Regionalism in World Politics*. Oxford University Press.
- Implikasi Kerjasama Trans-Pacific Partnership guna Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan ASEAN dalam rangka Ketahanan Regional. (2013). *Jurnal Kajian Lemhanas RI. Edisi 16, 65*.

- Moon, C. (2002). *Economic Regionalism*. Retrieved February 3, 2017, from Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/topic/economic-regionalism>
- Naidu-Ghelani, R. (2015, April 20). Retrieved from BBC News: Business: <http://www.bbc.co./news/business-32387376>
- (2013). *National Economic Trends (Nominal GDP) of US*. Federal Reserve Bank of St. Louis.
- Nawali, F. (2011). *Mengapa Rusia dan AS lirik kawasan Asia Tenggara*. Retrieved from <http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/19/43019/Mengapa--Rusia-dan-AS-Lirik-Kawasan-Asia-Tenggara>
- Pengertian Perang Dingin, Penyebab dan Dampaknya*. (2015, December). Retrieved from <http://www.katapengertian.com/2015/12/pengertian-perang-dingin-penyebab-dan.html>
- Preferential Trade Agreements in Asia and the Pacific. (2002). *Asian Development Outlook. Regional Cooperation in Asia*, p. 178.
- Putra, A. H. (2011). Peluang, Tantangan dan Implikasi Trans Pacific Partnership. In *Buletin Kerja Sama Perdagangan Internasional Edisi IV* (p. 17). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Ravenhill, J. (2011). *Global Political Economy*. Oxford University Express .
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Issues and Way Forward*. (2013, July 30). Retrieved from The Diplomat: <http://thediplomat.com/2013/07/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep-issues-and-way-forward/>
- Remarks by President Obama to the Australian Parliament*. (2011, November 17). Retrieved from The White House – Office of the Press Secretary: <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-parliament>
- Russett, B. M. (1967). *International Regions and the International System: A Study in Political Ecology*. Chicago, IL: Rand McNally.
- Schwartz, N. (2013). *Recovery in U.S. Is Lifting Profits, but Not Adding Jobs*. New York: New York Times.
- TPP Negotiation Updates*. (n.d.). Retrieved from United States Trade Representative: <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-negotiation-updates>

- White, G. (2013, February 10). *China trade now bigger than US*. Retrieved from Daily Telegraph:
<http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/9860518/China-trade-now-bigger-than-US.html>
- Wignaraja, G. (2014). *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP): An initial assessment*. Asian Development Bank Institute.
- Wisnu, D. (2016, May 18). *Apa Kabar TPP dan RCEP?* Retrieved from Sindo:
<http://koran-sindo.com/news.php?r=0&n=2&date=2016-05-18?r=0&n=2&date=2016-05-18>
- Yifei, X. (2015). *Competitive Mega-Regional Trade Agreements: Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) vs. Trans-Pacific Partnership (TPP)*. University of Pennsylvania Scholarly Commons.
- Yuan, W. J. (2012). *The Trans-Pacific Partnership and China Corresponding Strategies*. A Freeman Briefing Report.
- Yuliantoro, N. (2012). *Menuju Kekuatan Utama Dunia*. Yogyakarta: Institute of International Studies.